



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PIDATO KETUA BPK RI

**DALAM ACARA
PENYERAHAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2023
KEPADA DPR RI**

JAKARTA, 5 DESEMBER 2023



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

**Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
*Om Swastiasthu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.***

Yang Terhormat, Ketua DPR RI;
Yang Terhormat, para Wakil Ketua DPR RI;
Yang Terhormat, Wakil Ketua dan para Anggota BPK RI;
Yang Terhormat, para Anggota DPR RI; serta
Hadirin yang saya hormati.

Perkenankan kami untuk mengawali sambutan ini dengan menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 (atau IHPS I 2023) dalam Rapat Paripurna DPR pagi ini.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

IHPS memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara atau daerah.

IHPS I 2023 mengungkapkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari tahun 2005 hingga semester I 2023, dengan tindak lanjut **telah sesuai rekomendasi BPK sebesar 76,9%.**

Namun demikian, untuk hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020 hingga semester I 2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi **baru** mencapai **47,0%**.

Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga Semester I 2023 **sebesar Rp132,69 triliun. Rp19,20 triliun** di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-semester I 2023.

IHPS I Tahun 2023 juga memuat ringkasan dari **705 laporan hasil pemeriksaan** (atau LHP), yang terdiri atas 681 LHP Keuangan, 2 LHP Kinerja, dan 22 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

LHP tersebut mengungkapkan **9.261 temuan** yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp18,19 triliun**.

Dari nilai temuan tersebut, dua klasifikasi temuan dengan nilai terbesar adalah potensi kerugian sebesar Rp7,43 triliun dan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,01 triliun.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar **Rp852,82 miliar**.

Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka *good governance*.

Sinergi dan integrasi antara BPK dan DPR adalah aspek fundamental untuk mewujudkan hal tersebut.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

IHPS I Tahun 2023 memuat **134** hasil **pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022** pada **pemerintah pusat**, di antaranya adalah 81 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dengan 80 opini WTP dan 1 Wajar Dengan Pengecualian atau WDP serta 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dengan opini WTP.

Satu LKKL yang memperoleh **opini WDP** adalah **Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika** terkait permasalahan aset peralatan mesin senilai Rp3,8 triliun dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp1,9 triliun terkait *Based Tranceiver Station* (BTS) yang tidak dapat diyakini.

Selain itu, 40 laporan keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) diberikan opini 33 WTP, 6 WDP, dan 1 Tidak Wajar (TW) karena permasalahan realisasi belanja modal berpotensi tidak layak bayar sebesar Rp6,44 miliar dan realisasi pembayaran biaya remunerasi sebesar Rp1,83 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya serta kelebihan pembayaran *reimbursable expenses* sebesar Rp 1,73 miliar dan realisasi pembayaran *reimbursable expenses* sebesar Rp695,60 juta belum dapat diyakini bukti pertanggungjawabannya.

Capaian opini WTP pada LKKL tahun 2022 telah mencapai 99% atau telah melampaui target 93% yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat,

BPK juga telah memeriksa **542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)** Tahun 2022. Dari 542 Pemda, sebanyak 91% atau 496 Pemda memperoleh opini WTP, 8% atau 41 Pemda memperoleh opini WDP, dan 1% atau 5 Pemda memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat atau TMP.

Capaian opini WTP atas LKPD Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi sebesar 94% dan pada Pemerintah Kabupaten sebesar 91%, telah melampaui target RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 93% dan 82%. Sedangkan capaian opini WTP pada Pemerintah Kota sebesar 91%, **belum sesuai target RPJMN sebesar 93%.**

Selain LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BPK juga telah memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya tahun 2022, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji. BPK memberikan opini WTP terhadap keempat laporan keuangan tersebut.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

IHPS I Tahun 2023 juga mencakup pemeriksaan atas **empat tema prioritas nasional**, yaitu penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, penguatan infrastruktur, serta penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pemeriksaan tersebut juga sebagai bentuk peran BPK untuk **mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)***.

Selain itu, IHPS ini juga memuat dua hasil pemeriksaan kinerja, yang terdiri atas satu objek pemeriksaan pemerintah pusat dan satu objek pemeriksaan BUMN, dengan tema prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi.

Pemeriksaan kinerja tersebut antara lain pengelolaan batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi TA 2020 hingga semester I 2022 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Pemerintah telah melakukan di antaranya menyusun *road map* menuju *Net Zero Emissions (NZE)* pada tahun 2060 dan mengamankan pasokan batu bara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri, antara lain berupa kebijakan *domestic market obligation* batu bara dan alokasi gas bumi.

Namun, masih terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi capaian pemerintah tersebut secara signifikan.

Antara lain, belum dilakukan sepenuhnya mitigasi risiko atas skenario transisi energi menuju NZE pada tahun 2060 dan rendahnya kemajuan proyek Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang berpotensi terjadinya kekurangan pasokan pada sebagian besar sistem kelistrikan nasional.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dalam IHPS I Tahun 2023 diantaranya atas pendapatan, biaya, dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya, dengan permasalahan signifikan antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan yang memadai.

Selain itu, tarif layanan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM kepada pelanggan premium belum sepenuhnya diterapkan oleh PT PLN.

Tarif yang dikenakan saat ini menggunakan tarif reguler ditambah nilai layanan premium yang mengakibatkan PT PLN kehilangan pendapatan sebesar Rp5,69 triliun pada uji petik tahun 2021.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

IHPS I 2023 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah tahun 2005 hingga semester I 2023 dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp4,89 triliun.

Tingkat penyelesaian menunjukkan bahwa telah dilakukan pelunasan sebesar Rp1,78 triliun, dalam proses angsuran sebesar Rp1,30 triliun, dan penghapusan sebesar Rp90,90 miliar. Dengan demikian, terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,72 triliun atau 35% dari total kasus kerugian negara/daerah.

Laporan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli periode 2017- Semester I 2023 telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan telah dimanfaatkan yaitu:

1. 25 LHP investigatif, telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan sebanyak 8 laporan dan dalam proses penyidikan sebanyak 17 laporan.
2. 363 Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara telah dimanfaatkan untuk proses penyidikan sebanyak 56 laporan dan sudah dinyatakan P-21 sebanyak 307 kasus.
3. Pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan atas 362 kasus yang seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Seluruh informasi lengkap dalam IHPS dan LHP BPK semester I Tahun 2023 ini dapat diakses melalui laman: ihps.bpk.go.id.

Pimpinan dan Para Anggota DPR, serta Hadirin yang berbahagia,

Tahun 2023 ini juga menandai capaian kapasitas kelembagaan BPK, terutama di kancah Internasional.

Selain memimpin Panel Pemeriksa Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2022-2023 November lalu, BPK juga masih dipercaya sebagai pemeriksa eksternal atas beberapa lembaga internasional.

Diantaranya pada *Inter-Parliamentary Union* untuk periode 2023 hingga 2025, *World Intellectual Property Organization* (atau WIPO) periode 2024 hingga 2029, dan alhamdulillah, pada 1 Desember lalu, dalam *IMO Assembly*, BPK terpilih kembali sebagai *external auditor* untuk *International Maritime Organization* (IMO), termasuk *World Maritime University* dan *International Maritime Law Institute* periode 2024 hingga 2027.

Selain itu, BPK juga terpilih sebagai tuan rumah *International Congress of Supreme Audit Institutions* (atau INCOSAI) ke-26 pada Tahun 2028 dan menjadi Ketua Organisasi BPK se-dunia atau *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) periode 2028 hingga 2031 serta menjadi sekretariat organisasi lembaga pemeriksa negara-negara anggota ASEAN (atau ASEANSAI) periode 2024 hingga 2029.

Torehan prestasi tersebut merupakan perwujudan atas dedikasi dan sinergi dengan para *stakeholders* BPK, terutama DPR RI.

Untuk itu, pada kesempatan baik ini, kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya, kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR, atas kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan BPK, terutama dalam mewujudkan tujuan bernegara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Semoga, sinergi antara DPR dan BPK dapat terjalin lebih kuat dan lebih solid lagi di masa mendatang. Kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi seluruh upaya baik kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'alamin*.

**Bilहितtaufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om.**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua**

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.